



Persepsi Orang Tua Anak yang Putus Sekolah terhadap Pendidikan Formal di Desa Pulau Enam

Rahmawati^{1)*}, Riska Elfira¹⁾, Mudaimin¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

*Correspondence: ama07812@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persepsi orang tua terhadap pendidikan formal dalam konteks anak yang putus sekolah di Desa Pulau Enam, Kecamatan Togean. Desa ini merupakan kawasan kepulauan terpencil di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Fenomena putus sekolah di wilayah ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktural yang kompleks, meliputi kemiskinan, isolasi geografis, dan rendahnya relevansi pendidikan formal bagi kehidupan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjawab dua rumusan masalah. Pertama, persepsi orang tua bersifat ambivalen: secara normatif mereka mengakui pentingnya pendidikan formal, namun dalam praktik keseharian mereka cenderung memandang pendidikan sebagai beban yang tidak terjangkau dan kurang relevan dengan kehidupan nelayan kepulauan. Kedua, solusi yang ditawarkan mencakup empat strategi kontekstual, yaitu penguatan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tepat sasaran, pengembangan model belajar berbasis komunitas, pelibatan tokoh lokal dalam kampanye pendidikan, serta advokasi pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran yang nyata tentang dinamika pendidikan di wilayah kepulauan terpencil sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang berakar pada konteks lokal.

Kata Kunci: Persepsi Orang Tua; Putus Sekolah; Pendidikan Formal; Masyarakat Kepulauan; Togean; Solusi Kontekstual

This is an open access article under the CC-BY license.



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun jaminan hukum tersebut telah ada cukup lama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak Indonesia, terutama di daerah kepulauan dan pesisir terpencil, masih belum menikmati hak tersebut secara penuh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 mencapai 78.468 anak secara nasional, dengan tingkat putus sekolah di jenjang SMA/SMK mencapai 1,02 persen (BPS, 2024). Angka tersebut bukan hanya deretan statistik, melainkan potret nyata dari jutaan mimpi anak-anak yang terpaksa terhenti di tengah jalan.

Data BPS (2023) mencatat kesenjangan yang sangat mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana tingkat putus sekolah pada jenjang SMA di desa mencapai 43,62 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah kota yang hanya 26,75 persen (BPS, 2023). Angka ini mempertegas bahwa masalah putus sekolah bukan persoalan merata, melainkan sangat terkonsentrasi di daerah-daerah dengan keterbatasan akses. Desa Pulau Enam, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu gambaran nyata dari wilayah yang menghadapi tantangan berlapis tersebut. Kondisi kepulauan yang terisolasi secara geografis, ditambah ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor perikanan yang hasilnya tidak menentu, membentuk konteks yang membuat anak-anak sulit untuk bertahan di bangku sekolah.

Perspektif orang tua menjadi titik masuk yang paling relevan untuk memahami fenomena putus sekolah. Keputusan seorang anak berhenti bersekolah hampir selalu berkaitan dengan pandangan, kondisi, dan keputusan keluarga. Penelitian Awaru et al. (2023) pada masyarakat pesisir menyimpulkan bahwa anak putus sekolah merupakan konsekuensi dari disfungsi institusi pendidikan yang tidak mampu menyesuaikan diri

dengan struktur sosio-spasial khas masyarakat pesisir, di mana mobilitas kerja dan jaringan sosial memiliki logika tersendiri yang kerap tidak terakomodasi oleh sekolah formal (Awaru et al., 2023). Pandangan ini menunjukkan bahwa akar masalah bukan hanya terletak pada kesadaran individual orang tua, melainkan pada ketidaksesuaian antara sistem pendidikan formal dengan realitas kehidupan masyarakat kepulauan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persepsi orang tua terhadap pendidikan formal, seperti penelitian Wahir et al., (2026) serta penelitian di Kepulauan Nias tentang bagaimana isolasi geografis dan nilai budaya membentuk persepsi pendidikan. Penelitian (Agustina & Rahayu, 2022) juga menemukan bahwa perubahan pola pikir nelayan terhadap pendidikan dapat terjadi ketika masyarakat terbuka terhadap nilai baru dari luar. Namun penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi orang tua di wilayah kepulauan Togean, sekaligus merumuskan solusi yang benar-benar kontekstual dengan kondisi lokal, masih belum tersedia. Kekosongan ini penting untuk diisi karena sebagian besar kajian persepsi orang tua terhadap pendidikan formal selama ini terfokus pada wilayah pesisir daratan, sementara karakteristik kepulauan yang terisolasi laut memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang bagaimana isolasi geografis kepulauan membentuk pola persepsi orang tua yang spesifik, sekaligus memperkaya literatur tentang putus sekolah di komunitas nelayan kepulauan yang selama ini masih terbatas jumlahnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam persepsi orang tua terhadap anak yang putus sekolah serta terhadap pentingnya pendidikan formal di Desa Pulau Enam, Kecamatan Togean. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan solusi konkret yang kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi orang tua dalam mendukung keberlanjutan pendidikan formal anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam pengalaman dan makna yang dirasakan langsung oleh orang tua terkait pendidikan formal dan fenomena putus sekolah anak mereka (Sugiyono, 2020). Desain fenomenologi dipilih dibanding studi kasus atau etnografi karena fokus penelitian ini bukan pada satu kasus tunggal atau pada pola budaya secara luas, melainkan pada makna subjektif yang dialami langsung oleh sekelompok orang tua terhadap fenomena yang sama, yaitu anak putus sekolah. Studi kasus akan lebih tepat jika fokusnya pada satu keluarga atau satu peristiwa spesifik, sementara etnografi menuntut keterlibatan jangka panjang untuk memahami keseluruhan sistem budaya. Fenomenologi memungkinkan peneliti memahami realitas sebagaimana yang dialami dan dimaknai oleh subjek penelitian, bukan sebagaimana yang diasumsikan dari luar (Mahmud, 2025).

Penelitian dilaksanakan di Desa Pulau Enam, Kecamatan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik desa sebagai kawasan kepulauan terpencil dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan dan teridentifikasinya sejumlah kasus anak putus sekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penelitian berlangsung selama dua bulan, mulai dari observasi awal hingga analisis dan penyusunan laporan.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Informan utama adalah 8 orang tua yang memiliki anak putus sekolah minimal satu orang di jenjang SD, SMP, atau SMA, dengan rentang usia 32 sampai 55 tahun dan mayoritas berprofesi sebagai nelayan tangkap harian. Tingkat pendidikan informan bervariasi dari tidak tamat SD hingga tamat SMP, dan lama anak putus sekolah berkisar antara satu hingga empat tahun pada saat penelitian dilakukan. Informan pendukung terdiri dari 3 tokoh masyarakat dan 2 guru sekolah setempat. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan berlangsung intensif guna membangun kepercayaan (rapport) dengan informan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tema menerima normatif namun menolak praktikal, skeptis terhadap relevansi, dan positif namun terkendala akses, diperoleh melalui proses koding terbuka terhadap transkrip wawancara, kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan pola

jawaban dan sikap informan terhadap dua pertanyaan kunci, yaitu pandangan mereka tentang pentingnya sekolah dan alasan di balik keputusan anak berhenti sekolah. Pengelompokan ini diperkuat melalui diskusi antar peneliti dan dicocokkan kembali dengan data observasi serta dokumentasi lapangan, sehingga tiga pola tersebut bukan kategori yang dibuat di awal melainkan muncul dari data itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Orang Tua di Desa Pulau Enam Terhadap Anak yang Putus Sekolah dan Terhadap Pentingnya Pendidikan Formal

Orang tua di Desa Pulau Enam tidak memiliki persepsi yang tunggal tentang pendidikan formal dan fenomena putus sekolah yang dialami anak-anak mereka. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa di balik setiap keputusan membiarkan anak berhenti sekolah, terdapat proses pertimbangan yang panjang dan penuh tegangan antara keinginan dan kenyataan. Tiga pola persepsi teridentifikasi dari proses analisis tematik, namun ketiga pola ini tidak berdiri terpisah melainkan saling tumpang tindih dalam satu ruang kehidupan yang sama.

Persepsi Menerima Secara Normatif namun Menolak Secara Praktikal

Pola ini tidak lahir dari ketidakpedulian, melainkan dari sebuah proses yang bisa disebut sebagai kepasrahan yang terstruktur. Orang tua dalam kelompok ini awalnya memiliki harapan nyata bahwa anaknya akan bersekolah sampai tuntas. Mereka menyekolahkan anak di jenjang dasar, membayar iuran, dan mendampingi anak belajar selama bertahun-tahun. Titik balik terjadi bukan karena mereka berubah pikiran tentang nilai pendidikan, melainkan karena kondisi ekonomi yang memburuk, tangkapan ikan yang tidak menentu, atau ada anggota keluarga yang sakit, memaksa mereka melakukan kalkulasi ulang tentang mana yang lebih mendesak antara biaya sekolah dan kebutuhan makan harian.

Proses dilema itu terlihat nyata dalam tuturan Ibu NR, seorang ibu dari anak yang putus sekolah di jenjang SMP. Beliau mengungkapkan bahwa keputusan anaknya berhenti bukan berasal dari larangannya, melainkan dari kondisi yang perlahan mempersulit dirinya untuk memberikan dukungan finansial paling dasar sekalipun.

“Saya sebenarnya tidak pernah bilang ke anak berhenti sekolah. Saya selalu bilang kalau sekolah itu penting. Tapi waktu bapaknya sudah jarang melaut karena cuaca buruk, uang memang sudah tidak ada. Lama-lama saya tidak bisa lagi kasih uang transport sama uang jajannya. Anak juga bilang malu sering tidak bayar. Akhirnya dia sendiri yang bilang mau berhenti dulu”

Hal serupa dituturkan oleh Bapak HS, seorang nelayan yang anaknya putus sekolah di jenjang SMA. Kutipan berikut memperlihatkan bahwa keputusan berhenti sekolah bukan diambil dalam satu momen impulsif, melainkan merupakan hasil dari perundingan keluarga yang menyakitkan di tengah tekanan ekonomi yang tidak memberikan ruang pilihan lain.

“Waktu itu saya sama istri duduk bicara malam-malam. Pendapatan dari melaut tidak cukup lagi. Mau bayar sekolah atau beli beras, itu yang kami pikirkan. Akhirnya saya bilang ke anak, kalau memang mau bantu orang tua dulu tidak apa-apa. Berat memang, tapi kami tidak punya pilihan.”

Dua kutipan di atas memperlihatkan satu pola yang konsisten, yaitu orang tua tidak pernah mencabut nilai pendidikan dari keyakinannya, namun secara perlahan menghentikan dukungan praktis yang pada akhirnya membuat anak sendiri yang memutuskan berhenti. Alokamai, (2023) menyebut pola ini sebagai dismotivasi berbentuk pembiaran, di mana orang tua tidak secara aktif melarang anak bersekolah tetapi juga tidak berupaya mempertahankan anak agar tetap di sekolah. Temuan di Desa Pulau Enam memperkaya konsep ini dengan menunjukkan bahwa pembiaran tersebut tidak bersifat pasif, melainkan merupakan respons aktif terhadap tekanan ekonomi yang terakumulasi dan tidak memberikan celah pilihan yang bermakna.

Persepsi Skeptis Terhadap Relevansi Pendidikan Formal

Orang tua dalam kelompok ini pernah percaya pada pendidikan formal, bahkan ada di antara mereka yang dulu sempat antusias menyekolahkan anak. Perubahan persepsi terjadi secara bertahap ketika mereka mengamati bahwa anak-anak di lingkungan mereka yang sudah menamatkan sekolah ternyata tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, tidak bisa membantu keluarga lebih cepat, dan tidak tampak lebih sejahtera dibanding teman-teman mereka yang tidak pernah sekolah namun sudah mahir melaut sejak remaja.

Pengamatan empiris bertahun-tahun itulah yang perlahan menggeser keyakinan mereka. Bapak AM, seorang nelayan, menggambarkan proses pergeseran keyakinan itu melalui perbandingan langsung yang ia saksikan di komunitasnya.

“Saya lihat anak-anak yang sudah tamat SMA di sini banyak juga yang akhirnya ikut melaut. Jadi saya kadang berpikir, sekolah tinggi tapi kalau akhirnya kerja juga di laut, kenapa tidak belajar dari sekarang saja. Di laut justru cepat dapat pengalaman.”

Persepsi yang sama muncul dari sudut pandang yang berbeda dalam penuturan Ibu SN. Jika Bapak AM berbicara dari pengamatan terhadap orang lain di komunitasnya, Ibu SN mengangkat persoalan dari pengalaman anaknya sendiri di dalam kelas yang ia rasakan tidak relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Anak saya pernah bilang pelajaran di sekolah banyak yang susah dipahami, sementara di rumah kami butuh dia bantu pergi cari ikan sama bapaknya. Saya juga lihat di sekolah tidak pernah diajarkan soal pekerjaan nelayan. Jadi kadang saya pikir apa yang dipelajari di sekolah jauh sekali dengan kehidupan kami di sini.”

Kelompok orang tua ini sesungguhnya bukan antipati terhadap pendidikan secara umum, melainkan kritik yang sangat spesifik terhadap ketidaksesuaian kurikulum dengan konteks kehidupan mereka. Gagasan *culturally responsive education* menegaskan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna ketika materi yang diajarkan terhubung dengan konteks budaya dan kehidupan nyata peserta didik (Susilo & Fathoni, 2025). Prinsip *contextual learning* juga menyatakan bahwa pengetahuan lebih mudah diterima apabila peserta didik dapat melihat hubungan langsung antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di lingkungannya (Sepriady, 2019). Hugen & Zulkarnain, (2025) menemukan kondisi serupa di wilayah pesisir Belitung Timur, di mana sistem nilai masyarakat nelayan yang menempatkan laut sebagai ruang pendidikan yang lebih sah daripada sekolah formal terbentuk dari pengalaman kolektif bertahun-tahun. Sementara Saputra & Agustina, (2025) menegaskan bahwa perubahan persepsi masyarakat terhadap pendidikan baru benar-benar terjadi ketika mereka menyaksikan sendiri manfaat konkret pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan dari kampanye atau himbauan verbal. Selama kesenjangan antara isi pelajaran dan kenyataan hidup di laut terus berlangsung tanpa ada perubahan substansial, persepsi skeptis ini akan terus bertahan dan bahkan menguat dari generasi ke generasi.

Persepsi Positif namun Terkendala Akses

Pola ketiga memiliki karakter dilema yang paling menyakitkan karena orang tua dalam kelompok ini tidak pernah ragu dengan nilai pendidikan. Mereka adalah orang tua yang memiliki keinginan paling kuat agar anaknya bersekolah, bahkan di tengah keterbatasan ekonomi mereka tetap mencoba bertahan selama anak masih bisa bersekolah di pulau. Dilema baru muncul secara akut ketika anak harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karena SMP dan SMA berada di kecamatan yang dipisahkan oleh laut.

Ibu RM menggambarkan proses pertimbangan itu dengan sangat konkret, termasuk bagaimana ia dan suaminya mencoba menghitung kebutuhan riil anaknya dan membandingkannya dengan penghasilan mereka yang sangat bergantung pada musim.

“Kami sebenarnya sangat ingin anak lanjut sekolah. Tapi setelah dihitung-hitung, ongkos kapal, uang kos, makan, sama kebutuhan sekolah itu lebih besar dari penghasilan kami satu bulan. Kalau musim ombak datang, bapaknya bisa berminggu-minggu tidak melaut. Jadi kami sudah tidak sanggup lagi.”

Ini memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa direduksi menjadi sekadar masalah kemiskinan biasa. Ini adalah masalah kemiskinan yang berlapis dengan keterisolasian geografis, sehingga biaya yang harus ditanggung keluarga nelayan di kepulauan jauh lebih besar dibanding keluarga miskin di daratan yang anaknya bisa berjalan kaki ke sekolah. Penelitian Asmiati et al., (2022) menemukan kondisi yang hampir identik, di mana rendahnya minat melanjutkan studi anak nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi orang tua yang tidak stabil serta keterbatasan transportasi antarpulau. Temuan di Desa Pulau Enam memperkuat kesimpulan itu sekaligus menambahkan dimensi baru, yaitu bahwa kalkulasi biaya yang dilakukan orang tua kepulauan bersifat sangat kontekstual dan musiman, sehingga intervensi yang efektif pun harus mempertimbangkan fleksibilitas musiman, bukan hanya nominal bantuan per bulan yang bersifat tetap.

Tabel 1. Pola Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Formal di Desa Pulau Enam

Pola Persepsi	Proses Pembentukan Dilema	Implikasi
Menerima Normatif, Menolak Praktikal	Harapan bersekolah runtuh bertahap akibat tekanan ekonomi yang terakumulasi, berujung pada pembiaran terstruktur ketika dukungan finansial paling dasar tidak lagi tersedia	Intervensi ekonomi langsung dan pendampingan keluarga
Skeptis terhadap Relevansi	Terbentuk dari pengamatan bertahun-tahun bahwa alumni sekolah tidak tampak lebih sejahtera, diperkuat oleh pengalaman anak yang merasa kurikulum jauh dari kebutuhan hidup nelayan	Reformasi kurikulum kontekstual dan pembuktian nyata manfaat pendidikan di komunitas
Positif namun Terkendala Akses	Keinginan menyekolahkan anak kuat, tetapi kalkulasi biaya lintas pulau yang bersifat musiman melebihi kapasitas ekonomi keluarga nelayan secara struktural	Intervensi infrastruktur, beasiswa, dan subsidi transportasi laut yang fleksibel musiman

Ketiga pola persepsi ini secara bersama-sama membentuk lingkaran masalah yang tidak bisa diputus dengan satu jenis intervensi. Yang perlu dicatat adalah bahwa ketiga kelompok ini hidup berdampingan di desa yang sama, bahkan dalam satu keluarga bisa ditemukan lebih dari satu pola sekaligus. Siregar, (2016) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran pendidikan di komunitas nelayan tidak bisa dimaknai sebagai ketidakpedulian semata, melainkan merupakan respons rasional terhadap kondisi struktural yang memang tidak mendukung. Temuan di Desa Pulau Enam memperkuat kesimpulan ini sekaligus memperlihatkan dimensi prosesual yang selama ini belum banyak dijelaskan dalam literatur, yaitu bagaimana orang tua secara aktif menjalani proses pertimbangan dan tarik-menawar antara nilai dan kondisi sebelum akhirnya sampai pada keputusan yang tampak seperti pasrah namun sesungguhnya adalah hasil dari kalkulasi bertahan hidup yang sangat rasional.

Solusi untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Orang Tua terhadap Keberlanjutan Pendidikan Formal

Optimalisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Secara Tepat Sasaran

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua di Desa Pulau Enam yang anaknya putus sekolah tidak mengetahui prosedur pendaftaran KIP dan tidak pernah mendapat pendampingan dari pihak mana pun untuk mengaksesnya. Beberapa di antaranya bahkan tidak mengetahui bahwa mereka memenuhi syarat sebagai penerima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan bukan pada ketiadaan program, melainkan pada lemahnya jangkauan sosialisasi di tingkat komunitas kepulauan yang terisolasi. menegaskan bahwa pemberdayaan orang tua sebagai upaya preventif putus sekolah perlu dilakukan melalui penguatan pemahaman tentang urgensi pendidikan yang dipadukan dengan akses nyata terhadap program bantuan yang tersedia. Pemerintah desa perlu melakukan pendataan ulang dan mendampingi proses pendaftaran KIP bagi keluarga yang selama ini terlewat, serta mempertimbangkan subsidi komponen transportasi laut antarpulau sebagai bagian dari skema bantuan yang memang hanya relevan bagi wilayah kepulauan seperti Togean.

Data BPS (2024) mencatat bahwa 76 persen keluarga yang anaknya putus sekolah mengaku tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka (BPS, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa bantuan finansial bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat utama agar orang tua bisa membuat pilihan yang berbeda. Subsidi yang mencakup biaya transportasi laut antarpulau juga perlu dipertimbangkan sebagai komponen khusus dalam skema bantuan untuk wilayah kepulauan seperti Togean.

Pengembangan Model Pendidikan Berbasis Komunitas yang Fleksibel

Temuan lapangan mengungkap bahwa salah satu alasan orang tua membiarkan anak berhenti sekolah adalah ketidakmampuan jadwal sekolah formal untuk menyesuaikan diri dengan ritme kerja keluarga nelayan, terutama saat musim panen tangkapan yang mengharuskan seluruh anggota keluarga terlibat. Model sekolah konvensional yang mengharuskan kehadiran penuh dan anak bermukim jauh dari pulau dianggap terlalu mahal secara sosial dan ekonomi. Awaru et al., (2023) menemukan bahwa upaya yang berhasil mengurangi angka putus sekolah di komunitas pesisir adalah memfasilitasi anak-anak yang sudah terlanjur berhenti untuk mengikuti program Paket A, B, dan C dengan subsidi operasional dari pemerintah desa, karena model ini tidak merenggut anak dari kegiatan ekonomi keluarga secara total. Pendekatan serupa sangat relevan untuk diterapkan di Desa

Pulau Enam, ditambah dengan integrasi materi keterampilan kelautan dan pengelolaan hasil tangkapan ke dalam kurikulum lokal agar orang tua yang skeptis terhadap relevansi pendidikan formal dapat melihat nilai nyata dari proses belajar anak mereka.

Pendidikan berbasis komunitas juga mencakup integrasi kearifan lokal dan keterampilan kelautan ke dalam materi pembelajaran. Penelitian tentang budaya pendidikan anak pesisir di wilayah Kepulauan Spermonde menunjukkan bahwa pendidikan yang relevan secara budaya dan ekonomi memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi di kalangan keluarga nelayan dibandingkan pendidikan yang murni berorientasi akademik (JP3, 2019). Kurikulum yang memasukkan pengetahuan tentang ekosistem laut, teknologi penangkapan berkelanjutan, dan kewirausahaan perikanan akan membuat orang tua melihat pendidikan bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan mereka, tetapi sebagai penguatan dari apa yang sudah mereka jalani.

Pelibatan Tokoh Lokal dalam Kampanye Kesadaran Pendidikan

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keputusan keluarga di Desa Pulau Enam sangat dipengaruhi oleh figur-figur yang dipercaya di tingkat komunitas, seperti tokoh agama, kepala dusun, dan pemimpin nelayan. Beberapa informan secara eksplisit menyebut bahwa nasihat dari tokoh-tokoh tersebut memiliki bobot yang jauh lebih besar dibanding anjuran dari pihak luar. Ini berarti pesan tentang pentingnya pendidikan akan lebih efektif jika disampaikan melalui forum-forum yang sudah diakrabi masyarakat, seperti pengajian, rapat dusun, atau pertemuan kelompok nelayan, bukan melalui sosialisasi formal dari dinas yang selama ini jarang menjangkau wilayah kepulauan terpencil. Pelibatan tokoh lokal juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai komunitas nelayan dengan tujuan pendidikan formal, sehingga pendidikan tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang datang dari luar dan tidak memahami kehidupan mereka (Riniwati et al., 2025).

Penyuluhan pendidikan yang dilakukan melalui forum-forum lokal seperti pengajian, rapat dusun, atau pertemuan kelompok nelayan juga terbukti lebih efektif menjangkau orang tua yang tidak terbiasa dengan pendekatan formal. Program kesadaran masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Literasi Nusantara di beberapa desa terpencil di Nusa Tenggara Timur berhasil meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah hingga 25 persen dalam waktu kurang dari satu tahun melalui pendekatan komunitas yang intensif (IJE Journal Kemdikbud, 2024). Pendekatan serupa sangat potensial untuk diterapkan di Desa Pulau Enam dengan menyesuaikan format pada konteks budaya Togeian.

Advokasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Wilayah Kepulauan

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa hambatan geografis bukan sekadar hambatan sekunder, melainkan hambatan paling fundamental yang membuat ketiga solusi sebelumnya tidak akan bisa bekerja maksimal tanpa intervensi struktural ini. Selama fasilitas sekolah menengah hanya tersedia di kecamatan yang dipisahkan oleh laut, setiap upaya peningkatan kesadaran orang tua akan terus berbenturan dengan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki infrastruktur yang memungkinkan keinginan itu diwujudkan. Advokasi yang perlu didorong kepada pemerintah daerah dan pusat mencakup pembukaan kelas jauh atau unit sekolah menengah di pulau, pengadaan asrama beasiswa bagi siswa kepulauan yang bersekolah di kecamatan, serta program insentif nyata bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah kepulauan terpencil. Tanpa ketersediaan guru yang memadai, infrastruktur fisik yang dibangun pun tidak akan memberikan dampak yang optimal.

Beberapa opsi infrastruktur yang dapat diadvokasikan meliputi pembukaan kelas jauh atau unit sekolah menengah di pulau, pengadaan asrama beasiswa untuk siswa dari kepulauan yang bersekolah di kecamatan, serta program insentif bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah kepulauan. Program Guru Garis Depan (GGD) yang menempatkan guru-guru berkualitas di daerah pelosok perlu terus diperluas dan diperkuat agar daerah-daerah kepulauan seperti Togeian tidak terus mengalami kekurangan tenaga pendidik berkualitas (IJE Journal Kemdikbud, 2024). Tanpa tenaga pengajar yang memadai, infrastruktur fisik yang dibangun pun tidak akan memberikan dampak optimal.

Refleksi dan Interpretasi Integratif

Keempat solusi yang dirumuskan di atas tidak bisa berdiri sendiri-sendiri dan bukan pula daftar rekomendasi yang bersifat alternatif. Temuan lapangan justru menunjukkan bahwa ketiga pola persepsi yang ditemukan masing-masing membutuhkan jenis intervensi yang berbeda, dan seorang anak yang akhirnya bisa bertahan di sekolah kemungkinan besar memerlukan kombinasi dari lebih dari satu solusi secara bersamaan. Program KIP yang optimal tanpa infrastruktur pendidikan yang memadai tidak akan efektif bagi kelompok yang

terkendala akses geografis. Kampanye kesadaran melalui tokoh lokal tanpa diikuti intervensi ekonomi tidak akan mengubah perilaku nyata orang tua dalam jangka panjang, terutama bagi kelompok yang menghadapi tekanan ekonomi struktural. (Awaru et al., 2023) menegaskan bahwa penanganan masalah putus sekolah pada masyarakat pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara bersamaan, bukan oleh satu pihak saja. Temuan di Desa Pulau Enam memperkuat kesimpulan itu dan menambahkan satu dimensi penting, yaitu bahwa modal sosial berupa harapan orang tua dan keinginan anak yang sesungguhnya belum padam merupakan titik balik yang paling strategis untuk diaktifkan, selama intervensi yang diberikan benar-benar menjawab hambatan struktural yang selama ini membelenggu mereka.

Tabel 2. Solusi untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan di Desa Pulau Enam

Solusi	Uraian	Keterangan
Optimalisasi KIP tepat sasaran	Keluarga miskin yang belum terdaftar penerima KIP	Pemerintah desa, sekolah, Dinas Sosial
Pendidikan berbasis komunitas dan kurikulum kontekstual	Anak putus sekolah dan orang tua yang skeptis terhadap relevansi	Dinas Pendidikan, PKBM, pemerintah desa
Pelibatan tokoh lokal dalam kampanye pendidikan	Orang tua dengan persepsi pragmatis dan rendahnya motivasi	Tokoh agama, tokoh adat, kepala dusun
Advokasi infrastruktur pendidikan kepulauan	Seluruh anak usia sekolah yang terkendala jarak	Pemerintah kabupaten, DPRD, Kemendikbud

Keempat solusi tersebut tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Keberhasilan satu solusi sangat bergantung pada keberadaan solusi yang lain. Program KIP yang optimal tanpa infrastruktur pendidikan yang memadai tidak akan efektif (Wisdawati & Hanafi, 2026). Kampanye kesadaran oleh tokoh lokal tanpa diikuti intervensi ekonomi juga tidak akan mengubah perilaku nyata orang tua dalam jangka panjang. Hal ini sesuai dengan rekomendasi penelitian Awaru et al. (2023) yang menegaskan bahwa penanganan masalah putus sekolah pada masyarakat pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan, bukan oleh satu pihak saja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi orang tua di Desa Pulau Enam terhadap anak yang putus sekolah dan terhadap pentingnya pendidikan formal hadir dalam tiga pola yang berbeda namun saling terkait, yaitu menerima secara normatif namun menolak secara praktikal karena tekanan ekonomi yang terakumulasi, skeptis terhadap relevansi kurikulum bagi kehidupan nelayan kepulauan berdasarkan pengamatan empiris bertahun-tahun, serta mendukung pendidikan secara tulus namun tidak mampu mengatasi hambatan akses geografis yang berlapis dengan keterbatasan ekonomi musiman. Ketiga persepsi ini membentuk sebuah gambaran bahwa masalah putus sekolah di wilayah ini bukan lahir dari ketidakpedulian orang tua, melainkan dari kondisi struktural yang tidak memberikan mereka ruang untuk memilih berbeda.

Penelitian ini juga merumuskan empat solusi kontekstual yang berakar pada kondisi nyata Desa Pulau Enam, yaitu optimalisasi KIP secara tepat sasaran disertai pendampingan pendaftaran, pengembangan model pendidikan berbasis komunitas yang fleksibel dan relevan secara budaya, pelibatan tokoh lokal sebagai agen kampanye kesadaran pendidikan, serta advokasi pembangunan infrastruktur pendidikan kepulauan yang lebih dekat dan terjangkau. Keempat solusi ini tidak bisa dijalankan secara terpisah, melainkan perlu diimplementasikan secara simultan dan terintegrasi agar dapat memutus lingkaran masalah yang selama ini menghalangi anak-anak Desa Pulau Enam untuk bertahan di bangku sekolah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas dan memperinci konsep persepsi pendidikan pada komunitas kepulauan yang selama ini belum banyak dibedakan dari komunitas pesisir daratan dalam literatur pendidikan Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa isolasi geografis berbasis laut bukan sekadar faktor pemberat, melainkan faktor pembentuk dinamika persepsi yang unik karena menciptakan kalkulasi biaya dan risiko yang jauh berbeda dari komunitas miskin di daratan. Penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa persepsi orang tua terhadap pendidikan bersifat berlapis dan tidak bisa diperlakukan sebagai variabel tunggal, sehingga teori dan instrumen pengukuran persepsi pendidikan yang dikembangkan untuk konteks perkotaan atau daratan perlu diuji dan disesuaikan kembali ketika diterapkan pada komunitas kepulauan terpencil.

Secara kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa pendekatan satu program untuk semua tidak akan efektif di wilayah kepulauan. Kebijakan pendidikan yang responsif terhadap konteks kepulauan perlu mempertimbangkan tiga hal secara bersamaan, yaitu komponen bantuan ekonomi yang mencakup biaya transportasi laut sebagai kebutuhan khas kepulauan, fleksibilitas model pembelajaran yang tidak memaksa anak bermukim jauh dari keluarga, serta keterlibatan aktif struktur sosial lokal dalam desain dan pelaksanaan program. Tanpa kombinasi ketiganya, intervensi yang dirancang dengan baik pun berisiko tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian dengan cakupan lebih luas di seluruh kecamatan Togean atau perbandingan antarpulau di Kabupaten Tojo Una-Una akan memperkuat generalisasi temuan ini sekaligus membuka ruang untuk menguji apakah ketiga pola persepsi yang ditemukan bersifat khas Desa Pulau Enam atau berlaku lebih luas di komunitas kepulauan serupa. Pendekatan penelitian campuran yang menggabungkan data kualitatif mendalam dengan survei kuantitatif berskala lebih besar juga dapat menghasilkan pemetaan persepsi yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih dapat digeneralisasi ke wilayah kepulauan terpencil lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agustina, M. T., & Rahayu, P. P. (2022). Makna Pentingnya Pendidikan Anak bagi Masyarakat Nelayan. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4), 6378–6386.
- Alokamai, W. (2023). Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Pendidikan Formal Anak. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Pendidikan Sosiologi Vol.*, 1(2), 1–10.
- Asmiati, Sumardi, L., Ismail, M., & Alqadri, B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), 786–793.
- Awaru, A. O. T., Manda, D., Indriani, & Najamuddin. (2023). MENGGALI AKAR PERMASALAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH PADA MASYARAKAT PESISIR: Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Pendidikan. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 28(1), 136–147.
- Hugen, M., & Zulkarnain, I. (2025). Konstruksi Budaya Terhadap Anak Putus Sekolah di Masyarakat Pesisir Desa Baru, Belitung Timur. 02(02), 946–961.
- Mahmud. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I). Yayasan Darul Falah.
- Riniwati, H., Handayani, W., Wardani, M. P., & Dewi, S. M. (2025). *MASYARAKAT PESISIR DI ERA TRANSFORMASI: INTEGRASI GENDER DALAM EKONOMI MARITIM MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN* (1st ed.). Madza Media.
- Saputra, A. H., & Agustina, W. (2025). Peningkatan motivasi siswa melalui penggunaan media interaktif dalam pembelajaran pendidikan jasmani *Improving students ' motivation through the use of interactive media in physical education learning*. 5(1), 217–226.
- Sepriady, J. (2019). CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH Oleh: Jeki Sepriady*. *Jurnal PGRI Palembang*, 100–110.
- Siregar, N. S. S. (2016). Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(1), 1–10.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Susilo, Y. E., & Fathoni, A. (2025). Implementasi Culturally Responsive Teaching Pada Pembelajaran Pancasila Untuk Memotivasi Semangat Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 449–460.
- Wahir, L. O., Syahrir, A., & Saleh, M. (2026). Persepsi Orang Tua Anak Putus Sekolah Terhadap Pentingnya Pendidikan Formal di Kelurahan Walambenowite Kabupaten Muna. *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 105–115.

- Wisdawati, R., & Hanafi, M. (2026). Apakah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Efektif sebagai Instrumen Pembangunan untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi? *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 15, 389–399. <https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9839>